

**Judul** : Pimpinan DPR RI Bakal Dikocok Ulang?  
**Tanggal** : Kamis, 04 Januari 2018  
**Surat Kabar** : Indo Pos  
**Halaman** : 1-7

# Pimpinan DPR RI Bakal Dikocok Ulang?

JAKARTA-Seiring dengan pembahasan revisi Undang-Undang No 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), semakin kuat wacana untuk melakukan kocok ulang para pimpinan DPR RI. Ini juga terkait dengan nama baru pengganti Setya Novanto, sekaligus keinginan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mengganti Fahri Hamzah.

"Ya silakan saja. Yang punya partai, yang punya fraksi kan Pak Sahibul Iman (Presiden PKS). Dia mau apakan, silakan. Cuma saya aliran kritis, bahwa dalam politik itu tidak hanya sekedar kekuasaan tapi lebih mulia yang lebih tinggi. Begitu, namanya juga usaha," kata Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI, menanggapi wacana kocok ulang pimpinan DPR RI, kepada INDOPOS, Rabu (3/1) ■■■

**Baca Pimpinan...7**

# Pimpinan DPR RI Bakal Dikocok Ulang?

» Sambungan dari halaman 1

Menurut dia, wacana kocok ulang itu karena adanya keinginan PKS yang kembali berniat melengserkannya dari kursi pimpinan DPR. Diwacanakanlah kocok ulang, melobi PDIP dan Golkar dengan mendesak dilakukannya revisi terhadap UU MD3. Ini pun seiring dengan hasrat PDIP yang meminta jatah kursi di pimpinan di DPR RI. "Ya namanya juga usaha, jadi usaha yang mau ditempuh," kata Fahri.

Fahri juga mengaku, mendengar PKS rela kehilangan kursi Wakil Ketua DPR asalkan dirinya lengser. Oleh sebab itu, dirinyapun pasrah jika nantinya PKS bersikeras untuk melengserkannya dari jabatan Wakil Ketua DPR. Namun, ia menegaskan dirinya akan tetap mengkritisi upaya PKS tersebut.

Soal penambahan kursi pimpinan DPR RI menurut Fahri, tidak dapat segera direalisasikan dalam waktu dekat. Pasalnya, Lembaga legislatif akan memperpanjang masa pembahasan revisi Undang-Undang No 17 tahun 2014 tersebut pada masa sidang selanjutnya. Padahal, semua fraksi telah menyatakan sepakat serta Badan Legislatif (Baleg) DPR RI ketuk palu.

"DPR akan memperpanjang masa pembahasan revisi UU MD3 pada masa

sidang selanjutnya," ungkap Fahri.

Fahri mengatakan, lembaganya telah memutuskan untuk memperpanjang waktu, meskipun perundangan ini masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas). Hal ini supaya pasal-pasal yang tertuang dalam perundangan tersebut dapat dikaji secara mendalam.

"Kami juga membuat kajian yang lebih komprehensif di tim implementasi reformasi, karena ada keinginan perubahannya itu lebih substantif," ucapnya.

Menurut Fahri, pembahasan perundangan ini masih ada tarik ulur dari berbagai pihak, sehingga wajar diperlukan tambahan waktu untuk mengkajinya. Contohnya, ada ide-ide yang berkembang yakni, nama perundangan ini akan diubah menjadi legislatif atau lembaga perwakilan.

"Kenapa namanya tidak disesuaikan saja menjadi UU Lembaga Perwakilan atau Undang-Undang Legislatif. Ada juga yang mengatakan, undang-undangnya kita pisah antara DPR, MPR dan DPD, karena DPRD telah diatur sendiri dalam UU Pemda," jelasnya.

Sementara Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Demokrat, Agus Hermanto mengaku keberatan jika penambahan kursi pimpinan dewan jumlahnya lebih dari satu. "Kalau saya lihat, kalau namanya satu kursi barang kali masih

dilihat spacenya. Kelayakannya ya masih mungkin, bisa layak. Tapi kalau itu nambah dua atau tiga, ya rasanya menjadi kurang available," kata Agus kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (3/1).

Agus mengatakan, awal mula wacana penambahan kursi pimpinan DPR karena pertimbangan buat PDIP yang tidak mendapat jatah kursi di level pimpinan, padahal partai ini pemenang pemilu 2014.

"Namun, di tengah perjalanannya ini menjadi sedikit agak pudar karena ada yang minta lebih dari satu kursi. Sehingga perlu difokuskan kembali," ujar Agus. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu mengaku bingung, apa jadinya kalau semua fraksi dapat jatah kursi pimpinan parlemen.

Diharapkan, persoalan ini dibahas kembali di antara semua fraksi agar revisi UU MD3 yang direncanakan untuk dilakukan revisi bisa fokus.

"Kalau kita lihat, kalau menambah lebih dari satu kursi nanti seperti apa tuh. Namanya pimpinan kok teralu banyak. Sudah saatnya ini difokuskan dulu. Sehingga nanti setelah semua fokus dibicarakan dalam Pansus UU MD3, kemudian dikoordinasikan dengan pemerintah," kata Agus.

Sementara, Sekretaris Fraksi Partai

Golkar di DPR, Agus Gumiwang Kartasmita menyatakan, pergantian Ketua DPR yang diajukan fraksinya dibarengi dengan penambahan kursi pimpinan DPR untuk PDIP.

Agus menambahkan, hal itu merupakan kehendak politik dari Partai Golkar di bawah kepemimpinan Ketua Umum, Airlangga Hartarto untuk menyelesaikan polemik revisi UU MD3. Hal itu dinilai wajar bila PDIP sebagai partai peraih suara terbanyak pada pemilu 2014 turut memperoleh kursi pimpinan DPR. Ia menambahkan hal itu merupakan etika politik yang harus dijunjung.

"Sehingga akan sangat elok apabila ketua DPR dan pimpinan DPR yang baru hasil revisi UU MD3 bisa dilantik bersama," tukasnya.

Agus Gumiwang juga meyakini pembahasan UU MD terkait penambahan kursi pimpinan DPR akan berjalan lancar. Dengan demikian, pembahasan UU MD3 tak menghambat proses pergantian Ketua DPR yang melibatkan internal Partai Golkar.

"Saya yakin bisa kami selesaikan secara baik dengan musyawarah. Kami di DPR banyak pengalaman membahas RUU dan perppu yang sesungguhnya lebih berat dan pelik dibanding revisi MD3 ini, dan selama ini bisa diselesaikan dengan baik," tutupnya. (aen)